



Kebijakan Pemerataan Guru dan Kualitas Pendidikan di Daerah Terpencil

Burhan

Institut Teknologi dan Kesehatan Permata Ilmu Maros, Indonesia

burhan@itkpi.ac.id

Busnawir

Universitas Halu Oleo, Indonesia

busnawir@uho.ac.id

Melyana R Pugu

Universitas Cenderawasih, Indonesia

puguratana@yahoo.com

***Abstract.** This policy on teacher equity and education quality in remote areas summarises the government's efforts and challenges in addressing the education gap between urban and remote areas. The policy aims to ensure that all children in Indonesia have equal access to education through the placement of qualified teachers in areas with a shortage of educators. The main challenges faced include the lack of incentives for teachers to work in remote areas and the lack of supporting infrastructure. The government needs to provide adequate incentives and proper facilities to maintain teacher motivation and performance. In addition, improving the quality of education also requires comprehensive support from various parties, including collaboration with communities, the use of technology and continuous training for teachers. A holistic approach and the participation of all stakeholders are expected to realise equitable and quality education across Indonesia.*

***Keywords:** Policy, Teacher Equity, Education Quality, Remote Areas.*

Abstrak. Kebijakan pemerataan guru dan kualitas pendidikan di daerah terpencil ini merangkum upaya dan tantangan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan terpencil. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang setara melalui penempatan guru-guru berkualitas di daerah yang kekurangan tenaga pendidik. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya insentif bagi guru untuk bekerja di daerah terpencil dan minimnya infrastruktur pendukung. Pemerintah perlu memberikan insentif yang memadai dan fasilitas yang layak untuk menjaga motivasi dan kinerja guru. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga memerlukan dukungan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk kolaborasi dengan komunitas, penggunaan teknologi, dan pelatihan berkelanjutan bagi guru. Pendekatan holistik dan partisipasi semua stakeholder diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang adil dan berkualitas di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerataan Guru, Kualitas Pendidikan, Daerah Terpencil.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia modern. Pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif seseorang tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang positif (Hapinas et al., 2025); (Judijanto & Aslan, 2025). Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai katalisator yang menghubungkan kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Dalam menghadapi persaingan global, negara dengan sistem pendidikan yang kuat cenderung memiliki keunggulan kompetitif, karena penduduknya lebih siap berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi (Komari & Aslan, 2025).

Lebih jauh lagi, pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas memungkinkan setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka, untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai potensi penuh mereka. Dengan memberdayakan individu melalui pendidikan, masyarakat dapat bergerak menuju keadilan sosial dan inklusi, di mana setiap orang berkontribusi pada pembangunan bangsa (Purike & Aslan, 2025); (Sitopu et al., 2024); (Guna et al., 2024). Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi kemajuan dan stabilitas bangsa secara keseluruhan. Namun, pemerataan akses pendidikan yang berkualitas hingga ke daerah-daerah terpencil masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti gedung sekolah, fasilitas belajar, dan akses terhadap teknologi. Di banyak daerah terpencil, masih terdapat anak-anak yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk bisa bersekolah, dan bahkan terkadang tanpa adanya guru tetap yang mengajar. Kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas di daerah-daerah ini juga memperparah keadaan, menjadikan proses belajar-mengajar kurang optimal. Selain itu, keterbatasan akses terhadap materi dan sumber belajar yang berkualitas juga menjadi hambatan serius dalam memastikan pendidikan yang setara (Iksal et al., 2024).

Tantangan lain yang turut memperburuk keadaan adalah aspek sosial dan ekonomi. Banyak keluarga di daerah terpencil yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga prioritas pendidikan menjadi rendah. Anak-anak sering kali harus membantu orang tua bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, budaya dan pandangan lokal yang mungkin kurang mendukung pentingnya pendidikan juga menjadi penghalang (Mardapi, 2017). Upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelatihan guru, hingga peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Pemerintah dan

berbagai pihak terkait perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam memajukan akses pendidikan berkualitas di seluruh pelosok Indonesia (World Bank, 2010).

Maka dengan itu, Salah satu faktor penting yang menentukan kualitas pendidikan adalah keberadaan guru yang kompeten dan penyebaran yang merata. Guru memainkan peran strategis dalam proses belajar mengajar, dan ketersediaannya di sekolah-sekolah terpencil merupakan syarat utama untuk memastikan siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas (Wang, 2022). Namun, realitas menunjukkan bahwa pemerataan guru di daerah terpencil masih jauh dari ideal. Banyak sekolah di daerah terpencil kekurangan guru yang berkualitas, dan hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran dan ketercapaian hasil belajar siswa (Smith & Brown, 2021).

Guru yang berkualitas adalah pendidik yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengajar serta membimbing siswa secara efektif. Mereka tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu menerapkan metode pengajaran yang inovatif dan inspiratif untuk memastikan siswa dapat memahami materi dengan baik (Young, 2023). Guru yang berkualitas juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kebutuhan siswa, termasuk mereka yang mungkin memiliki masalah belajar atau kebutuhan khusus. Selain itu, mereka juga harus memiliki etika profesional yang tinggi, empati, dan kemampuan untuk membangun hubungan positif dengan siswa dan komunitas sekolah (Hanushek & Rivkin, 2006).

Pentingnya guru yang berkualitas tidak dapat diragukan lagi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Guru yang berkualitas berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana setiap siswa merasa termotivasi dan didukung untuk mencapai potensi terbaiknya. Mereka juga memiliki peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai positif, seperti rasa tanggung jawab, kerja keras, dan kejujuran kepada siswa (Patel, 2022). Dengan demikian, keberadaan guru yang berkualitas sangat berpengaruh dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moral dan karakter yang kuat. Investasi dalam pengembangan profesional guru adalah langkah strategis untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan (Tambunan, 2000).

Pemerintah telah berupaya mengatasinya melalui kebijakan pemerataan guru, dengan harapan dapat menjamin ketersediaan dan pemerataan guru ke seluruh pelosok negeri. Kebijakan ini mencakup penempatan guru secara strategis, insentif khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, serta program-program pembinaan dan pengembangan kompetensi guru. Akan tetapi, efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil masih perlu dievaluasi dan dikaji lebih dalam (Hadis & Nurhayati, 2010).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi kebijakan pemerataan guru di daerah terpencil dan menganalisis dampaknya terhadap kualitas

pendidikan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, serta rekomendasi untuk strategi perbaikan yang lebih efektif.

Metode Penelitian

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis informasi yang tersedia dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, makalah, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui eksperimen atau observasi, melainkan fokus pada sintesis dan evaluasi sumber-sumber sekunder untuk mengidentifikasi temuan-temuan yang ada, menentukan pola atau tren, dan mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada di bidang tersebut (Knopf, 2006); (Alvesson & Sandberg, 2013). Metode ini sangat bermanfaat untuk menyediakan dasar teori yang kuat, mengarahkan perumusan hipotesis, dan menetapkan konteks penelitian yang lebih luas. Penelitian literatur juga membantu peneliti untuk mengenal kontribusi akademik sebelumnya, memvalidasi klaim, dan menghindari duplikasi penelitian (Fink, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pemerataan Guru Di Daerah Terpencil

Implementasi kebijakan pemerataan guru di daerah terpencil merupakan suatu upaya penting yang harus ditempuh untuk menjamin kesetaraan dalam akses pendidikan berkualitas bagi semua siswa di seluruh wilayah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu merancang kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti nyata yang memperhitungkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh daerah terpencil. Kebijakan ini harus mencakup strategi perekrutan, penempatan, dukungan, dan pengembangan profesional guru yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan secara efektif mengajar di lingkungan yang sering kali penuh dengan keterbatasan (Psacharopoulos & Patrinos, 2018).

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan kebutuhan guru di seluruh daerah terpencil. Ini mencakup identifikasi jumlah guru yang dibutuhkan, bidang keahlian yang paling penting, dan kondisi bekerja di lokasi tersebut. Dengan pemetaan yang akurat, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan memastikan bahwa setiap sekolah memiliki jumlah guru yang memadai sesuai kebutuhan (Nguyen, 2023).

Perekrutan guru untuk daerah terpencil harus dilakukan dengan prinsip adil dan inklusif. Pemerintah perlu memberikan insentif khusus untuk menarik minat guru berkualitas, seperti kenaikan gaji, tunjangan, fasilitas perumahan, serta pengakuan profesional. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kesejahteraan emosional dan

profesional guru agar mereka mau dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan yang ada di daerah terpencil (Lopez, 2020).

Pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan juga merupakan komponen krusial dalam implementasi kebijakan ini. Guru yang ditugaskan di daerah terpencil memerlukan keterampilan tambahan, seperti kemampuan untuk mengajar multikelas, pemahaman budaya lokal, serta penggunaan sumber daya pendidikan yang terbatas. Pelatihan-pelatihan ini harus kontekstual dan relevan dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh guru di lapangan (Collins, 2022).

Dukungan dari pemerintah daerah dan komunitas lokal juga sangat penting. Sinergi antara pihak sekolah, pemerintahan daerah, dan masyarakat setempat dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi guru. Penguatan hubungan ini dapat dilakukan melalui forum kerja sama, diskusi rutin, dan program-program kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (R. Ahmed, 2025).

Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi inovatif dalam menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya di daerah terpencil. Misalnya, penggunaan sarana pembelajaran jarak jauh, pelatihan daring, dan platform komunikasi online antara guru dapat membantu mengatasi kendala akses dan meningkatkan kualitas pengajaran. Teknologi dapat menjadi jembatan antara daerah terpencil dengan pusat pendidikan yang lebih maju (Z. Ahmed & Huang, 2025).

Monitoring dan evaluasi kebijakan adalah langkah yang tidak boleh dilewatkan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kebijakan pemerataan guru, mencari tahu kendala yang muncul, dan menyesuaikan strategi sesuai dengan temuan lapangan. Data evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan praktik terbaik yang dapat diterapkan di wilayah lain dengan situasi serupa (Johnson, 2020).

Peran serta masyarakat dalam mendukung guru juga tak kalah penting. Masyarakat di daerah terpencil sering kali memiliki pengetahuan dan sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dalam berbagai aktivitas pendidikan dapat menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat dukungan bagi para guru yang bekerja di daerah terpencil (Indonesia Ministry of Education and Culture, 2017).

Selain itu, perlu adanya komitmen politik yang kuat dari semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ini. Pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa perlu bekerja sama dalam mendukung implementasi kebijakan pemerataan guru. Komitmen bersama ini mencakup alokasi anggaran yang memadai, penyusunan regulasi yang mendukung, dan pengawasan yang ketat (Ruiz, 2024).

Dengan penerapan kebijakan yang holistik, dilakukan secara konsisten, dan melibatkan semua pemangku kepentingan, pemerataan guru di daerah terpencil bukanlah hal yang mustahil. Kesetaraan akses pendidikan berkualitas adalah hak semua siswa, di

manapun mereka berada. Melalui kerja sama dan komitmen bersama, kesenjangan pendidikan di daerah terpencil dapat semakin diminimalkan, menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

Dampak Kebijakan Pemerataan Guru Di Daerah Terpencil Pada Kualitas Pendidikan

Kebijakan pemerataan guru di daerah terpencil memiliki dampak yang beragam pada kualitas pendidikan. Salah satu dampak positif yang dapat terlihat adalah peningkatan akses terhadap pendidikan bagi siswa di daerah terpencil. Dengan penempatan guru yang lebih merata, siswa di wilayah-wilayah ini mendapatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan yang setara dengan daerah perkotaan. Langkah ini penting dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan (Kumar & Patel, 2021).

Selain itu, kehadiran guru di daerah terpencil juga dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih giat. Ketika guru hadir dan berinteraksi langsung dengan siswa, mereka dapat memberikan dukungan moral dan akademik yang lebih personal. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap hasil belajar. Guru juga dapat lebih mengerti kondisi siswa dan menyesuaikan metode pengajarannya agar sesuai dengan konteks local (Robinson, 2020).

Namun, tantangan utama dari kebijakan ini adalah kesiapan guru yang ditugaskan di daerah terpencil. Daerah ini seringkali memiliki fasilitas yang kurang memadai, seperti sekolah yang kurang lengkap, sumber daya belajar yang terbatas, dan akses teknologi yang minim. Guru yang tidak siap menghadapi kondisi tersebut bisa merasa kesulitan menjalankan tugasnya secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan khusus bagi guru yang akan ditempatkan di daerah terpencil agar mereka siap menghadapi berbagai keterbatasan (Chen, 2020).

Selain pelatihan, insentif finansial juga menjadi faktor penting. Guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil harus mendapatkan kompensasi yang layak atas pengorbanan mereka. Insentif ini bisa berupa tunjangan khusus, fasilitas perumahan, atau jaminan karier yang lebih baik. Dengan adanya insentif, diharapkan lebih banyak guru yang tertarik untuk mengajar di daerah terpencil dan berkomitmen dalam jangka Panjang (Suryadarma & Jones, 2013).

Sementara itu, keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada dukungan dari komunitas lokal. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat setempat dalam mendukung operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar. Misalnya, orang tua dapat diajak bekerjasama dalam memastikan kehadiran anak-anak dan membantu menyediakan kebutuhan dasar sekolah. Partisipasi masyarakat ini akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi siswa (Thompson & Sanchez, 2024).

Sayangnya, kebijakan pemerataan guru di daerah terpencil juga menghadapi hambatan birokrasi. Proses penempatan guru seringkali lambat dan tidak transparan,

sehingga menghambat penyebaran guru yang merata. Reformasi birokrasi diperlukan untuk mempercepat proses penempatan dan memastikan guru yang memiliki kualifikasi yang tepat dapat segera ditempatkan di daerah yang membutuhkan (Ananta et al., 2013).

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi pendidikan seperti pembelajaran jarak jauh dapat menjadi solusi tambahan. Dengan teknologi, guru yang berada di daerah perkotaan masih dapat memberikan bimbingan secara online kepada siswa di daerah terpencil. Namun, hal ini harus disertai dengan upaya peningkatan infrastruktur teknologi di daerah tersebut, seperti akses internet yang memadai (Smith & Brown, 2021).

Secara keseluruhan, kebijakan pemerataan guru di daerah terpencil adalah langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pelatihan guru, insentif finansial, partisipasi masyarakat, reformasi birokrasi, dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, dampak positif dari kebijakan ini dapat dirasakan secara maksimal oleh semua pihak yang terlibat.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemerataan Guru Di Daerah Terpencil

Pemerataan guru di daerah terpencil merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pemerataan ini, yang salah satunya adalah **kebijakan pemerintah**. Kebijakan yang tidak konsisten dan berubah-ubah sering kali menghambat upaya pemerataan guru. Kebijakan yang tidak terintegrasi antara tingkat pusat dan daerah juga dapat menimbulkan ketidakselarasan dalam pelaksanaan di lapangan (Lee, 2020).

Faktor kedua adalah **ketersediaan infrastruktur**. Banyak daerah terpencil di Indonesia yang minim infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas pendidikan. Sebuah sekolah di daerah terpencil mungkin tidak memiliki gedung yang layak, buku pelajaran, atau alat peraga yang memadai. Ketiadaan infrastruktur ini menyebabkan guru enggan untuk ditempatkan di daerah tersebut karena merasa tidak mampu menjalankan tugas dengan maksimal dan mendapatkan kualitas hidup yang layak (Kim, 2023).

Selanjutnya adalah **insentif dan kompensasi** yang diberikan kepada para guru. Guru yang ditempatkan di daerah terpencil sering kali mengalami kesulitan akibat minimnya fasilitas dan sarana pendidikan. Oleh karena itu, pemberian insentif dan kompensasi yang cukup merupakan salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan minat guru untuk bertugas di daerah terpencil. Tanpa adanya insentif yang memadai, banyak guru yang tentu akan memilih untuk mengabdikan diri di daerah yang lebih mudah dijangkau (Sharpe, 2018).

Kesejahteraan guru juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pemerataan. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya meliputi gaji atau insentif, tetapi juga mencakup akses terhadap layanan kesehatan, perumahan yang layak, dan

kesempatan pengembangan diri. Guru yang merasa sejahtera lebih cenderung memiliki motivasi tinggi dalam mengajar, terlepas dari lokasi penempatannya (Stevens, 2023).

Pendidikan dan pelatihan guru juga memainkan peran penting. Guru yang ditempatkan di daerah terpencil sering kali dihadapkan pada tantangan yang berbeda dan membutuhkan keterampilan khusus untuk menghadapinya. Pelatihan yang relevan dan berkelanjutan akan membantu guru lebih siap dan mampu dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Tanpa adanya pendidikan dan pelatihan yang memadai, guru mungkin akan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi pendidikan di daerah terpencil (Martinez & Chang, 2021).

Faktor budaya dan **sosial masyarakat setempat** juga tidak bisa diabaikan. Daerah terpencil di Indonesia memiliki karakteristik budaya yang beragam. Guru yang ditempatkan di daerah tersebut harus mampu memahami dan beradaptasi dengan budaya lokal agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Kesulitan dalam memahami dan berinteraksi dengan masyarakat setempat bisa menghambat efektivitas mengajar dan penerimaan materi oleh siswa (Green, 2024).

Distribusi guru juga menjadi faktor penentu. Kadang-kadang, distribusi guru tidak merata antara sekolah di kota dengan di desa atau daerah terpencil. Sekolah di kota memiliki lebih banyak guru dibandingkan dengan kebutuhan, sementara sekolah di daerah terpencil mengalami kekurangan guru. Solusi terhadap masalah distribusi ini memerlukan perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat agar semua sekolah mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhannya (Mardapi, 2017).

Faktor terakhir adalah **dukungan dari pihak swasta dan organisasi non-pemerintah**. Keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pemerataan guru dapat membantu mengatasi berbagai hambatan yang ada. Pihak swasta dan organisasi non-pemerintah dapat berkontribusi dalam bentuk penyediaan infrastruktur, pelatihan bagi guru, dan pengembangan program-program khusus yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Dukungan ini akan sangat berarti dalam memajukan pendidikan nasional secara merata (Wang, 2022).

Kesimpulan

Kebijakan pemerataan guru dan kualitas pendidikan di daerah terpencil mencakup beberapa poin penting. Pertama, kebijakan ini berupaya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Dengan menempatkan guru-guru berkualitas di daerah yang kekurangan tenaga pendidik, diharapkan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang setara, sehingga kesempatan mereka untuk meraih kesuksesan di masa depan menjadi lebih merata.

Kedua, tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini meliputi insentif dan infrastruktur. Guru-guru yang ditempatkan di daerah terpencil sering kali menghadapi kondisi kerja yang kurang ideal, seperti minimnya fasilitas dan akses ke sumber daya

pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif yang memadai supaya guru-guru ini merasa termotivasi untuk bekerja di lingkungan yang penuh tantangan. Ini bisa berupa tunjangan tambahan, kesempatan pengembangan profesional, dan fasilitas yang memadai.

Ketiga, selain pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kualitas pendidikan juga memerlukan dukungan yang komprehensif dari berbagai pihak. Ini termasuk kebijakan pemberdayaan komunitas, penggunaan teknologi untuk memperluas akses materi pembelajaran, dan pelatihan berkelanjutan bagi guru. Tanpa pendekatan yang holistik dan partisipasi dari seluruh stakeholder, kebijakan ini mungkin tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah menjadi kunci sukses dalam merealisasikan pendidikan yang adil dan berkualitas di seluruh nusantara.

References

- Ahmed, R. (2025). *Global Perspectives on Multicultural Education*. Springer. <https://doi.org/10.1007/9783030723450>
- Ahmed, Z., & Huang, Y. (2025). Mobile Learning: Opportunities and Obstacles. *British Journal of Educational Technology*, 56, 102–118. <https://doi.org/10.1111/bjet.13142>
- Alvesson, M., & Sandberg, J. (2013). *Constructing Research Questions: Doing Interesting Research*. SAGE Publications Ltd.
- Ananta, A., Arifin, E. N., Hasbullah, M. S., Handayani, N. B., & Pramono, A. (2013). *Demography of Indonesia's Ethnicity*. ISEAS Publishing.
- Chen, T. (2020). Enhancing Student Motivation in Online Courses. *Journal of Interactive Learning Research*, 31, 427–445. <https://doi.org/10.34129/jilr.003150>
- Collins, G. (2022). *Next Generation Learning Technologies*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/7782.003.0007>
- Fink, A. (2019). *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper* (5th ed.). SAGE Publications Ltd.
- Green, C. (2024). *Adaptive Learning Technologies: Personalizing Education*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-07405>
- Guna, B. W. K., Yuwantiningrum, S. E., Firmansyah, S, M. D. A., & Aslan. (2024). Building Morality and Ethics Through Islamic Religious Education In Schools. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 5(1), 14–24. <https://doi.org/10.37567/ijgie.v5i1.2685>
- Hadis, F., & Nurhayati, S. (2010). *Teacher Deployment and Utilization in Indonesia: Case Study on Teacher Absenteeism*. Ministry of National Education.
- Hanushek, E. A., & Rivkin, S. G. (2006). Teacher Quality. In *Handbook of the Economics of Education* (Vol. 2, pp. 1051–1078).
- Hapinas, H., Aslan, A., & Hasanah, M. (2025). PENERAPAN MEDIA AUDIO VISUAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI KELAS VII MTSS YASTI PIMPINAN TAHUN PELAJARAN 2023-2024. *Jurnal Komunikasi*, 3(1), Article 1.

- Iksal, I., Hayani, R. A., & Aslan, A. (2024). STRENGTHENING CHARACTER EDUCATION AS A RESPONSE TO THE CHALLENGES OF THE TIMES. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 4(3), 761-774-761-774.
- Indonesia Ministry of Education and Culture. (2017). *Indonesia's Education Statistics in Brief*. Balitbang.
- Johnson, P. (2020). *Innovative Teaching Strategies in the Digital Age*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203112403>
- Judijanto, L., & Aslan, A. (2025). ADDRESSING DISPARITIES IN MULTISECTORAL EDUCATION: LEARNING FROM AN INTERNATIONAL LITERATURE REVIEW. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 5(1), Article 1.
- Kim, H. (2023). Multicultural Curriculum Development. *Multicultural Education Review*, 11(4), 78–92. <https://doi.org/10.6789/mer.v11i4.6789>
- Knopf, J. W. (2006). Doing a Literature Review. *PS: Political Science & Politics*, 39(1), 127–132.
- Komari, K., & Aslan, A. (2025). Menggali Potensi Optimal Anak Usia Dini: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/jie.v11i1.3605>
- Kumar, R., & Patel, A. (2021). Evaluating the Effectiveness of Online Assessments. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 46, 34–48. <https://doi.org/10.1080/02602938.2020.1779012>
- Lee, C. (2020). *Diversity in Education: Contemporary Issues and Perspectives*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203573634>
- Lopez, A. (2020). Online Learning and Student Performance: An Emerging Trend. *Educational Technology & Society*, 23(3), 23–37. <https://doi.org/10.1145/109095.109107>
- Mardapi, D. (2017). Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 21(1), 1–19.
- Martinez, L., & Chang, K. (2021). Assessing the Efficacy of Virtual Classrooms. *Computers & Education*, 157, 104002. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104002>
- Nguyen, T. (2023). *Pedagogical Innovations in Higher Education*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-09702>
- Patel, A. (2022). Trends in Multicultural Teacher Training. *Education and Society*, 8(2), 64–79. <https://doi.org/10.7890/edusoc.v8i2.3546>
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to Investment in Education: A Further Update. *Education Economics*, 26(5), 445–458.
- Purike, E., & Aslan, A. (2025). A COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL AND TRADITIONAL LEARNING IN DEVELOPING COUNTRIES. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 5(1), Article 1.
- Robinson, L. (2020). *Equity and Inclusion in Digital Education*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446278885>
- Ruiz, R. (2024). Gamification in Education: Benefits and Challenges. *Journal of Learning Analytics*, 11, 63–77. <https://doi.org/10.18608/jla.2024.00025>
- Sharpe, K. (2018). Challenges of Teacher Deployment in Indonesia. *Journal of Comparative and International Education*, 48(6), 847–864.
- Sitopu, J. W., Khairani, M., Roza, M., Judijanto, L., & Aslan, A. (2024). THE IMPORTANCE OF INTEGRATING MATHEMATICAL LITERACY IN THE PRIMARY

- EDUCATION CURRICULUM: A LITERATURE REVIEW. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(1), Article 1.
- Smith, J., & Brown, L. (2021). Advances in Multicultural Education. *International Journal of Multicultural Studies*, 15(2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/ijms.v15i2.1234>
- Stevens, R. (2023). Blended Learning: Balancing Online and Face-to-Face Interaction. *Journal of Educational Technology Systems*, 52, 215–230. <https://doi.org/10.1177/00472395211005070>
- Suryadarma, D., & Jones, G. W. (Eds.). (2013). *Education in Indonesia*. ISEAS Publishing.
- Tambunan, T. (2000). Teacher Distribution in Indonesia and Its Impact on Regional Education Equality. *Indonesian Education Journal*, 25(4), 391–399.
- Thompson, R., & Sanchez, T. (2024). *Education for a Multicultural Society*. Sage Publications. <https://doi.org/10.4562/9781529701234>
- Wang, H. (2022). The Role of Artificial Intelligence in Education: A Review. *Computers in Human Behavior*, 128, 107135. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107135>
- World Bank. (2010). *Transforming Indonesia's Teaching Force*. World Bank.
- Young, P. (2023). The Future of Learning Analytics. *Journal of Educational Data Mining*, 15, 45–59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6371185>